

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian. Perubahan ekonomi setiap periode menjadi perhatian khusus publik sehingga mendorong bank untuk meningkatkan sistem keuangan dan kebijakan bank. Pelaksanaan kegiatan perbankan dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan perannya supaya mampu memberikan kinerja yang baik. Bank melakukan penghimpunan dana yang maksimal untuk mendukung penyaluran dana. Salah satu strategi yang digunakan bank dalam penghimpunan dana adalah melalui balas jasa atau provisi. Bank membentuk provisi untuk mengantisipasi kerugian potensial dan sebagai kontributor utama untuk fluktuasi laba dan modal bank. Provisi menarik dan merangsang nasabah menanamkan dana di bank karena dapat menguntungkan berupa bunga. (Olszrak *et al.*, 2018; Ozili, 2016).

Dana yang telah terhimpun kemudian digunakan bank untuk penyaluran kredit kepada masyarakat dan investasi seperti investasi pasar uang. Pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas utama bank sebagai lembaga intermediasi, akan tetapi pemberian kredit dalam jumlah banyak menimbulkan risiko yang besar pula, sehingga diperlukan pengawasan khusus manajemen sistematis risiko (Olszrak *et al.*, 2018). Untuk mengantisipasi risiko kredit, bank menggunakan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) atau *Loan Loss Provision*

(LLP) untuk mencerminkan *expected future losses* atau ekspektasi kerugian di masa depan atas kredit pada portofolio kredit bank. PPAP merupakan penggambaran estimasi manajemen terhadap potensi kenaikan kehilangan pendapatan dari kredit yang buruk atau kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*) dan merupakan pengurangan dari bagian pendapatan yang dialokasikan untuk *Loan Loss Reserve* (LLR) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Manajer bank menentukan besarnya estimasi PPAP untuk tujuan *income smoothing* atau *capital management* (Curcio Domenico, 2015; Ozili, 2016; Olszrak *et al.*, 2018). Besarnya PPAP sangat tergantung pada jumlah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. NPL dan PPAP pada umumnya dianggap sebagai guncangan kondisi ekonomi terhadap neraca bank.

Hubungan antara kondisi perekonomian makro dengan PPAP menjadi perhatian luas dalam literatur akuntansi dan keuangan. Kondisi perekonomian makro dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic product* (GDP), tingkat Inflasi (*inflation*), dan tingkat pengangguran (*unemployment*) (Chaibi dan Ftiti, 2014). Pada saat perekonomian memburuk, tingkat kredit bermasalah cenderung meningkat sehingga berpengaruh terhadap jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Namun, sejauh ini masih terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai sifat hubungannya. Sebagian besar penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan antara variabel tersebut negatif dan signifikan (Olszrak *et al.*, 2018; Yaziz *et al.*, 2015; Abid *et al.*, 2013; Konstantakis *et al.*, 2016; Chaibi dan Ftiti, 2014). Akan tetapi, terdapat

sedikit penelitian yang menemukan bahwa hubungan antara PDB dan PPAP tidak signifikan dan tidak sensitif (Ozili, 2016; Amar, 2014).

Terdapat dua argumentasi yang berlawanan yang dapat menjelaskan perbedaan hasil tersebut. Argumentasi pertama menyatakan bahwa manager bank lebih cenderung berperilaku prosiklus. Faktor mendasar dibalik perilaku prosiklus dalam penetapan PPAP adalah *risk taking dan risk aversion*. Ketika perekonomian membaik (*economics boom*), pihak bank lebih berani mengambil risiko. Namun, ketika perekonomian buruk (*economics bust*) pihak bank cenderung menghindari risiko secara maksimal karena kecil kemungkinan kreditur melunasi debit dengan pendapatan yang menurun. Hal ini diyakini dapat menurunkan PPAP (Olszrak *et al.*, 2018). Dampak dari kebijakan tersebut akan dirasakan pada saat ekonomi memburuk atau saat terjadi resesi. Peningkatan jumlah hutang yang cukup pesat akan mengganggu *cash flow* dari debitur setiap individu. Hal ini berdampak pula pada debitur korporasi karena melemahnya permintaan produk yang disebabkan menurunnya pendapatan penduduk karena pemotongan gaji untuk membayar hutang atau karena sudah tidak bekerja lagi sehingga memperlemah kemampuan debitur membayar hutangnya kepada bank. Konsekuensinya *bad debt* akan dilipatgandakan saat terjadi resesi ekonomi (Abid *et al.*, 2013; Yaziz *et al.*, 2015; Konstantakis *et al.*, 2016).

Argumentasi kedua menyatakan bahwa GDP tidak signifikan atau tidak sensitif terhadap PPAP karena bank cenderung berperilaku anti siklus bisnis (*countercyclical*). PPAP tidak prosiklus terhadap perubahan ekonomi yang disebabkan pemerintah ikut serta memberikan jaminan atas *debt* yang diberikan

bank ke sektor yang berisiko yang menyebabkan kredit macet dan guncangan ekonomi. Campur tangan pemerintah tersebut berakibat pada menurunnya PPAP (Ozili, 2016).

Adanya ketidakkonsistenan antara produk domestik bruto terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif karena regulasi dan kebijakan yang ditentukan pada bank konvensional dan bank syariah berbeda. Model bisnis bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan membuat perjanjian kontrak atau akad sehingga membatasi kemampuan manager bank dalam mengelola modal dan pendapatan melalui penyisihan penghapusan aktiva produktif sedangkan pada bank konvensional keuntungan dibagikan dengan sistem bunga. Selain itu, biaya agensi pada bank syariah relatif lebih tinggi karena pemangku kepentingan tidak terlibat langsung terhadap keuangan dan keputusan bisnis. Tata kelola bank syariah memiliki tata kelola 2 lapis (*double layer governance*) dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawal kegiatan operasionalnya berbeda dengan bank konvensional yang hanya memiliki satu lapis tata kelola perusahaan (*single layer governance*) yaitu dewan komisaris dan komite audit. Berdasarkan perbedaan tersebut maka perlu adanya variabel yang memoderasi hubungan antara kondisi makro ekonomi dan risiko kredit terhadap PPAP agar hasil pengujian menjadi lebih valid. Variabel moderasi tersebut yaitu karakteristik institusi bank yang tujuannya untuk mengetahui perbedaan perilaku bank konvensional dengan bank syariah (Elnahas et al, 2018).

Selain karakteristik institusional bank, fenomena berikut ini menggambarkan bahwa faktor perekonomian makro termasuk kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap penetapan besarnya PPAP. Kebijakan pemerintah seperti menurunkan atau menaikkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), dalam jangka pendek, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Imbasnya berupa tarikan beban ekonomi yang cukup berat. Penurunan bahan bakar minyak tidak otomatis menurunkan harga barang atau inflasi. Sebaliknya, jika suatu saat BBM dinaikkan kembali, maka dipastikan akan terjadi lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga, harga barang dan biaya transportasi otomatis mengalami kenaikan. Hal ini mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya karena pendapatan menurun yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan risiko kredit yang dihadapi semakin tinggi (Chaibi dan Ftiti, 2014).

Sementara itu, anjloknya harga komoditas dan minyak hingga USD30/barel pada Januari 2016 memberikan pengaruh ke sektor perbankan pula. Dampak yang berpotensi mengganggu stabilitas bank berupa kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL dirasakan oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Hal ini terjadi karena ada beberapa nasabah signifikan yang bergerak di sektor pertambangan rontok sehingga kepercayaan pelaku pasar menurun. Bangkrutnya beberapa perusahaan di sektor pertambangan juga disebabkan melambatnya perekonomian China, karena China merupakan pemakai komoditas batubara terbesar dan berperan penting pada penerimaan negara dan terkait beberapa perusahaan pertambangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau *lay*

off terhadap karyawan sehingga tingkat pengangguran meningkat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar debitur kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya (financedetik.com).

Penelitian ini penting dilakukan pertama, banyak ditemukan kredit bermasalah di perbankan Indonesia dan pentingnya estimasi penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya (*representation faithfulness*). Kedua, penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji determinan penyisihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan kebijakan instrumen makroprudensial (Olszrak, 2018; Ozili, 2017), yang dikontrol dengan salah satu aktivitas perbankan yang sensitif dengan siklus bisnis. Penelitian sebelumnya juga telah banyak mengkaji determinan penyisihan penghapusan aktiva produktif berdasarkan makroekonomi dan kredit bermasalah (Konstantakis *et al.*, 2016; Ozili, 2016; Fiharani dan Dastan 2016; Yaziz *et al.*, 2015; Chaibi dan Ftiti, 2014; Amar, 2014; Abid *et al.*, 2013). Namun, rata-rata penelitian tersebut hanya berfokus pada proksi pertumbuhan PDB untuk mengukur perubahan kondisi makroekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakan 2 proksi untuk mengukur pengaruh kondisi makroekonomi terhadap PPAP. Penelitian tentang kedua pengukuran penyisihan penghapusan aktiva produktif penting dilakukan untuk mengetahui estimasi kerugian yang diperkirakan.

Ketiga, penelitian ini lebih menarik karena menambahkan variabel karakteristik institusi bank untuk membedakan perilaku bank syariah dan bank

konvensional. Penelitian sebelumnya hanya menganalisis salah satu karakteristik bank dan tidak membandingkan keduanya.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah disajikan di atas maka penelitian ini diberikan judul ***“Pengaruh Kondisi Perekonomian Makro dan Risiko Kredit terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang di moderasi oleh Karakteristik Institusional Bank: Studi pada Industri Perbankan di Indonesia”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Bruto berpengaruh negatif terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif?
2. Apakah tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif?
3. Apakah risiko kredit berpengaruh positif terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat Inflasi terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam bidang penelitian dan khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan yang membahas tentang bagaimana hubungan kondisi perekonomian makro yang diukur dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi (*inflation*), dan risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), khususnya study kasus pada industri perbankan di Indonesia periode 2012 - 2017.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dilakukan sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu akuntansi tentang perekonomian makro dan keuangan tentang risiko kredit seperti kredit bermasalah dan kredit macet dalam konsentrasi atau indikator yang berpengaruh terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan guna menambah wawasan bagi peneliti lain yang berminat tentang kajian yang sama.

c. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator dalam menetapkan regulasi guna mengatasi kredit bermasalah pada saat kondisi perekonomian membaik maupun pada saat kondisi perekonomian memburuk.

